

**PENGARUH KUALITAS DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN DAN PERENCANAAN ANGGARAN TERHADAP
PENYERAPAN ANGGARAN**

**(Studi pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Resor Kendal, Sektor
Plantungan Tahun Anggaran 2018)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Wahid Hasyim

Disusun oleh:

Muhammad Hasan Faqih

161020101

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Muhammad Hasan Faqih
Nomor Induk Mahasiswa : 161020101
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Penelitian Skripsi : Pengaruh Kualitas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Resor Kendal, Sektor Plantungan Tahun Anggaran 2018)

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dosen Penguji I,

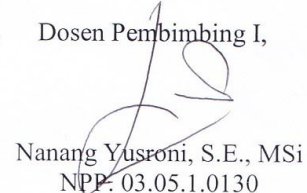


Khanifah SE., M.Si., Akt., CA
NIP 03.05.1.0130

2. Dosen Penguji II,

AtieqAmjadallah, SE., M.Si
NIP 03.07.1.0158

1. Dosen Pembimbing I,

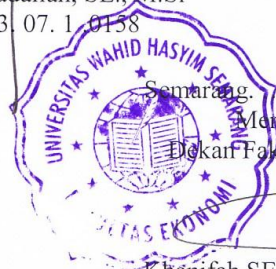


Nanang Yusroni, S.E., MSi
NIP. 03.05.1.0130

2. Dosen Pembimbing II,




Ernawati Budi Astuti, S.E., MSi
NIP.197610132005012002



Semarang,2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi



Khanifah SE., M.Si., Akt., CA
NIP 03.05.1.0130

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Hasan Faqih

Nomor Induk Mahasiswa : 161020101

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Penelitian Skripsi : Pengaruh Kualitas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Resor Kendal, Sektor Plantungan Tahun Anggaran 2018).

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Semarang,20...

Yang menyatakan,

Muhammad Hasan Faqih
NIM. 161020101

MOTTO

اقْرَأْ

“Bacalah”

(Al-Qur’an, Surah Al-‘Alaq)

*Bukan seberapa lama hidup ini yang dihitung,
tapi seberapa berarti kita menghabiskannya*

(Fiersa Besari)

Semangat pantang menyerah, lakukan dengan ikhlas

(Muhammad Hasan Faqih)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku dan adikku yang senantiasa memberikan do'a, perhatian, kasih sayang dan kepercayaan tanpa henti.
2. Almamaterku sebagai wujud terimakasihku.
3. Rekan-rekan Kanit, Kasi, Anggota dan Staf Polsek Plantungan yang mensupport dan memberikan semangat motivasi.
4. Teman perjuangan Kendal (Zakiyatul, Saeful, Vera dan Afifah) yang selalu mendukung dan memberikan semangat.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Pengaruh kualitas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran (Studi pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Resor Kendal, Sektor Plantungan Tahun Anggaran 2018)”. Skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana program S-1 di Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Mahmutarom HR., SH., M.H., selaku rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Ibu Khanifah, SE, M.Si., Akt, CA selaku Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang.
3. Bapak Atiq Amjadallah Alfie, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Wahid Hasyim Semarang.
4. Bapak Nanang Yusroni, SE., M.Si., dan Ibu Erna Budi Astuti, SE., M.Si selaku dosen pembimbing Skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Maupun Dosen Program Studi Manajemen Universitas Wahid Hasyim Semarang atas ilmu dan pengajaran yang telah diberikan selama ini.

6. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan semangat sehingga dapat berjalan dengan lancar.
7. Iptu Nundarto, S.H selaku Kepala Kepolisian Sektor Plantungan yang telah memberikan kesempatan ijin dalam menyelesaikan skripsi.
8. Rekan-rekan Kanit, Kasi, Anggota dan Staf Polsek Plantungan yang mensupport dan memberikan semangat motivasi.
9. Teman perjuangan Kendal (Zakiyatul, Saeful, Vera dan Afifah) yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-temanku Fadholi, Susanto, Arifin, Rossa, Agus, Sairoh, Lestari, dan seluruh Angkatan 2016, terimakasih atas dukungan dan doa selama penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman KKN Kedungpane "Hamba Allah" ke XXII yang memberikan semangat dukungan, dan doanya.
12. Saudara dan rekan-rekan dari semua pihak yang turut membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan dan doanya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan masukan, kritikan, dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan Negara.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang,2020

Muhammad Hasan Faqih

ABSTRAK

PENGARUH KUALITAS DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PERENCANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN (Studi pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Resor Kendal, Sektor Plantungan Tahun Anggaran 2018)

Disusun oleh:
Muhammad Hasan Faqih

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kualitas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Resor Kendal, Sektor Plantungan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, dengan data yang digunakan merupakan data Primer dan Populasi sebanyak 30, dimana responden tersebut merupakan pelaksana Anggaran di Polsek Plantungan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuesioneryang dibagikan kepada responden. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda dan Uji *T-Test* dengan alat bantu statistical package for the social sciences (SPSS) 16.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Uji *T-Test* Kualitas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran berpengaruh Positif 2,049 dan signifikan 0,050 terhadap Penyerapan Anggaran, begitu juga dengan Perencanaan Anggaran yang berpengaruh Positif 2,810 dan signifikan 0,009 terhadap Penyerapan Anggaran

Kata Kunci : Kualitas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Perencanaan Anggaran, Peyerapan Anggaran

ABSTRACT

THE EFFECT OF QUALITY OF BUDGET IMPLEMENTATION AND BUDGET PLANNING FOR BUDGET ABSORPTION

***(Study at the Central Java Regional Police, Kendal Resort, Plantungan Sector, Fiscal
Year 2018)***

Arranged by:

Muhammad Hasan Faqih

This study aims to determine the effect of the Quality of the Budget Implementation Entry List and Budget Planning on Budget Absorption in the Central Java Regional Police, Kendal Resort, and the Plantungan Sector. This research was conducted with a quantitative approach, with the data used were Primary and Population data of 30, where the respondents were executors of the Budget in the Plantungan Sector Police. Data collection was carried out through a survey using a questionnaire that was distributed to respondents. Data were analyzed using multiple regression analysis and T-Test with statistical package for the social sciences (SPSS) 16.0.

The results of the study show that the T-Test Quality List of Budget Implementation Filling has a positive effect of 2.049 and a significance of 0.050 on Budget Absorption, as well as a Budget Planning that has a positive effect of 2,810 and a significant 0.009 on the Absorption of the Budget

Keywords: Quality List of Provincial Budget Implementation, Budget Planning, Budget Implementation

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
2.1. Kegunaan Penelitian.....	5
2.2. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II.....	8
2.1. Landasan Teori.....	8
2.2. Penyerapan Anggaran.....	8
2.3. Perencanaan Anggaran.....	10
2.4. Kualitas DIPA.....	13
2.5. Penelitian Terdahulu.....	18
2.6. Kerangka Pemikiran.....	22
2.7. Hipotesis.....	23
BAB III.....	26
3.1. Jenis Penelitian.....	26
3.2. Variabel Penelitian.....	26

3.3. Definisi Operasional.....	27
3.4. Penentuan Sampel	29
3.5. Metode Pengumpulan Data	30
3.6. Metode Analisis.....	30
3.6.1. Statistik Deskriptif	30
3.6.2. Uji Validitas	31
3.6.3. Uji Realibilitas	31
3.6.4. Uji Heterokedasititas.....	31
3.6.5. Analisis Regresi Linier	32
3.6.6. Uji Parsial (Uji T- <i>test</i>)	33
3.7. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	33
BAB IV	35
4.1. Statistik Deskriptif	35
4.2. Uji Validitas	58
4.3. Uji Realibilitas.....	63
4.4. Uji Heterokedasititas	66
4.5. Analisis Regresi Linier	68
4.6. Uji Parsial (Uji T- <i>test</i>).....	70
BAB V.....	73
5.1. Kesimpulan.....	73
5.2. Keterbatasan	74
5.3. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN I.....	79
LAMPIRAN II	86
LAMPIRAN III.....	94
LAMPIRAN IV	115
LAMPIRAN V	118
LAMPIRAN VI.....	120
LAMPIRAN VII	121

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 MONITORING PENYERAPAN ANGGARAN TA. 2017 - 2018	2
TABEL 2.1 DAFTAR PENELITIAN TERDAHULU	18
TABEL 3.1 DIMENSI VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL....	27
TABEL 4. 1 RESPONDEN PENELITIAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN	35
TABEL 4. 2 RESPONDEN PENELITIAN BERDASARKAN USIA.....	36
TABEL 4. 3 RESPONDEN PENELITIAN BERDASARKAN LAMA BEKERJA.....	37
TABEL 4. 4 <i>DESCRIPTIVE STATISTIC</i>	37
TABEL 4. 5 <i>DESCRIPTIVE STATISTIC VARIABLE X1</i>	40
TABEL 4. 6 <i>DESCRIPTIVE STATISTIC VARIABLE X2</i>	46
TABEL 4. 7 <i>DESCRIPTIVE STATISTIC VARIABLE Y</i>	52
TABEL 4. 8 UJI VALIDITASVARIABELX1	59
TABEL 4. 9 UJI VALIDITASVARIABELX2.....	60
TABEL 4. 10 UJI VALIDITASVARIABELY.....	62
TABEL 4. 11 UJI REALIBILITASVARIABELX1	64
TABEL 4. 12 UJI REALIBILITASVARIABELX2.....	65
TABEL 4. 13 UJI REALIBILITASVARIABELY	66
TABEL 4. 14 ANALISIS REGRESI LINIER.....	69
TABEL 4. 15 UJI T.....	71

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2. 2 KERANGKA PEMIKIRAN.....	23
GAMBAR 4. 1 HISTOGRAM FREKUENSI PERTANYAAN X1.1	41
GAMBAR 4. 2 HISTOGRAM FREKUENSI PERTANYAAN X1.2	42
GAMBAR 4. 3 HISTOGRAM FREKUENSI PERTANYAAN X1.3	43
GAMBAR 4. 4 HISTOGRAM FREKUENSI PERTANYAAN X1.4	44
GAMBAR 4. 5 HISTOGRAM FREKUENSI PERTANYAAN X1.5	45
GAMBAR 4. 6 HISTOGRAM FREKUENSI PERTANYAAN X2.1	47
GAMBAR 4. 7 HISTOGRAM FREKUENSI PERTANYAAN X2.2	48
GAMBAR 4. 8 HISTOGRAM FREKUENSI PERTANYAAN X2.3	49
GAMBAR 4. 9 HISTOGRAM FREKUENSI PERTANYAAN X2.4	50
GAMBAR 4. 10 HISTOGRAM FREKUENSI PERTANYAAN X2.5	51
GAMBAR 4. 11 HISTOGRAM FREKUENSI PERTANYAAN Y.1	53
GAMBAR 4. 12 HISTOGRAM FREKUENSI PERTANYAAN Y.2	54
GAMBAR 4. 13 HISTOGRAM FREKUENSI PERTANYAAN Y.3	55
GAMBAR 4. 14 HISTOGRAM FREKUENSI PERTANYAAN Y.4	56
GAMBAR 4. 15 HISTOGRAM FREKUENSI PERTANYAAN Y.5	57
GAMBAR 4. 16 UJI HETEROKEDASITITAS.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I.....	79
LAMPIRAN II.....	86
LAMPIRAN III.....	94
LAMPIRAN IV.....	115
LAMPIRAN V.....	118
LAMPIRAN VI.....	120
LAMPIRAN VII.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Penerapan undang-undang tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberi harapan agar pemerintah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antara pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan dalam persaingan global. Selain itu, pemerintah jugadiharapkan mampu mempercepat laju kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran masyarakat, dan peningkatan daya saing, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kepuasan *public*.

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom tersebut, maka salah satu aspek yang harus diatur secara hati-hati oleh pemerintah adalah masalah anggaran dan pengelolaannya. Secara umum Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial (Mardiasmo, 2009) dalam (Seftianova, 2013). Untuk meningkatkan dan memelihara kesejahteraan maupun pelayanan rakyat.

Namun demikian, dalam pelaksanaan anggaran belanjanya, Polri selalu dihadapkan pada satu masalah klasik yang selalu terjadi yakni permasalahan dalam penyerapan anggaran. Daya serap anggaran belanja Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Kendal Sektor Plantungan dalam

dua tahun terakhir yaitu 88 persen dari pagu anggaran yang telah ditetapkan. Contohnya saja untuk realisasi penyerapan anggaran di tahun 2017 adalah sebesar Rp 215.171.800 (87 persen) dari pagu anggaran sebesar Rp. 247.744.000. walaupun realisasi anggaran untuk tahun 2018 naik 2 persen yaitu sebesar Rp. 171.691.000 (89 persen) dari pagu anggaran sebesar Rp. 195.914.000, akan tetapi tidak mendekati capaian yang seharusnya (100 persen) sebagai tolak ukur bahwa dalam pelaksanaan anggaran dapat mencapai hasil yang maksimal sebagaimana dijelaskan (Nundarto, 2019) Capaian Anggaran yang bagus adalah ketika prosentase capaiannya mendekati seratus persen.

Tabel 1.1 Monitoring Penyerapan Anggaran TA. 2017 - 2018

Tahun	Pagu Anggaran	Penyerapan	Capaian
2017	Rp. 247.744.000,-	Rp. 215.171.800,-	87 %
2018	Rp. 195.914.000,-	Rp. 171.691.000,-	89 %

Sumber : Monev DIPA TA 2017 & 2018 Polsek Plantungan

Selain rendahnya tingkat penyerapan anggaran di atas, permasalahan lain yang berhubungan dengan penyerapan anggaran adalah tidak proporsionalnya penyerapan anggaran disepanjang tahun anggaran. Pola pengeluaran negara menunjukkan tren yang relatif sama setiap tahunnya, yaitu mulai meningkat pada pertengahan triwulan ketiga dan puncaknya pada triwulan keempat, sementara pada triwulan–triwulan sebelumnya, meningkat secara landai dan hampir stagnan pada awal tahun. Pada tahun 2018, penyerapan anggaran pada triwulan I saja mencapai 18 persen sedangkan penyerapan anggaran pada triwulan II hanya mencapai 15 persen berbanding jauh dengan capaian pada triwulan III mencapai 67 persen dan di triwulan IV mencapai 89 persen.

Buruknya kualitas penyerapan anggaran ini akan berdampak terhadap pelayanan, keamanan dan kesejahteraan rakyat. Pertama, tidak berjalannya tugas pokok Polri yang mana melayani dan mengayomi masyarakat. Kedua, hilangnya manfaat belanja karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan yang berarti terjadi *idle money*. Ketiga, terlambatnya pelaksanaan program terkait dengan penanggulangan pelayanan Publik. Terakhir, penumpukan tagihan pada akhir tahun anggaran sangat tidak sehat bagi manajemen kas.

Perencanaan kas merupakan suatu bagian penting dalam upaya percepatan penyerapan anggaran karena dengan adanya perencanaan kas yang baik akan memastikan tersedianya dana untuk membiayai kegiatan pemerintah. Hal ini tentunya dapat mencegah kemungkinan terhambatnya suatu kegiatan akibat dari tidak tersedianya dana (Widiyanto, 2008) dalam (Seftianova, 2013).

Permasalahan dalam perencanaan anggaran lebih disebabkan karena masih adanya anggapan pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga bahwa anggaran yang diusulkan nantinya tidak akan disetujui semua. Akibatnya mereka mengusulkan anggaran yang lebih besar dari yang dibutuhkan tanpa memperhatikan faktor kemudahan implementasi dan kebutuhan riil di lapangan. Perencanaan anggaran yang tidak matang ini akan berdampak terhadap kualitas dokumen pelaksanaan anggaran atau DIPA karena DIPA sendiri merupakan hasil dari perencanaan anggaran yang tertuang dalam RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga). Perencanaan anggaran yang buruk ini akan menyebabkan anggaran belanja yang tertuang dalam DIPA harus direvisi. Bahkan dalam pengajuan penyusunan anggaran

yang tidak disertai dokumen pendukung yang memadai, seperti Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan Bulanan (RKB) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) menyebabkan anggaran yang diajukan diberi tanda bintang (blokir). Padahal, revisi dan penghilangan anggaran bertanda bintang memerlukan proses yang memakan waktu. Lebih parah lagi apabila revisi DIPA dilakukan beberapa kali, sehingga berakibat proses penyerapan belanja terhambat.

Hasil *workshop* Perencanaan Kas yang diadakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Direktorat Transformasi Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan di Yogyakarta pada tanggal 11 Agustus 2011 menyimpulkan bahwa semakin meningkatnya akurasi perencanaan kas maka semakin baik kualitas penyerapan anggaran. Peningkatan akurasi perencanaan kas dapat berdampak pada penyerapan anggaran yang proporsional (Yudiyanto, 2011)dalam (Seftianova, 2013).

Perencanaan kas sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas, sehingga pemanfaatan keuangan negara dapat dilaksanakan secara efisien dan dapat memberikan nilai tambah. Selain itu, kegiatan perencanaan kas juga merupakan suatu strategi manajemen kas yang dilaksanakan Bendahara Umum Negara guna memastikan bahwa negara selalu memiliki kas yang cukup untuk memenuhi pembayaran kewajiban negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran, serta terhadap saldo kas yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga dapat memberikan hasil yang optimal.

Sampai dengan saat ini, perencanaan kas dirasa belum memadai karena belum cukupnya tingkat partisipasi satker yang merupakan ujung tombak pengguna uang negara. Selama ini satker masih belum memahami dengan baik tentang pentingnya sebuah perencanaan anggaran. Oleh karena itu, komitmen bersama semua *stakeholder*, mulai dari pimpinan dan pelaksana teknis kegiatan pada satker, untuk tidak sebatas mengimplementasikan perencanaan anggaran, tetapi juga menjaga akurasi perencanaan anggaran sehingga penyerapan anggaran menjadi semakin berkualitas.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap tingkat Penyerapan Anggaran ?
2. Apakah Kualitas DIPA berpengaruh terhadap tingkat Penyerapan Anggaran?

1.3. Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Kualitas DIPA Terhadap Penyerapan Anggaran.
2. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran.

2.1. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

2.1.1. Kegunaan teoritis

Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, secara umum pada bidang ilmu akuntansi dan secara khusus pada bidang sektor publik (keuangan/anggaran).

2.1.2. Kegunaan praktis

Memberikan tambahan informasi kepada penelitian di bidang akuntansi dan dibidang sektor publik khususnya mengenai variable Kualitas DIPA, Perencanaan Anggaran dan Penyerapan Anggaran.

1. Guna menambah pengetahuan dalam bidang penelitian mulai dari pengumpulan data, pengolahan data hingga penyajian dalam bentuk laporan.
2. Bagi Kantor Kepolisian Sektor Plantungan, diharapkan dapat digunakan sebagai sumbang saran bagi para Pimpinan dalam mencapai tingkatan penyerapan anggaran.
3. Bagi akdemik, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi pada penelitian selanjutnya.

2.2. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan, bab ini berisi tinjauan secara umum perencanaan penelitian yang akan dilakukan.

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan teori dan konsep serta tinjauan empiris. Bab ini membahas mengenai teori yang manjadi dasar dalam proses meneliti. Peneliti mengkajinya dari berbagai sumber baik penelitian-penelitian

terdahulu sehubungan dengan judul sehingga menghasilkan hipotesis dan digambarkan di kerangka pikir berupa alur penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Bab III Kerangka Konseptual dan Hipotesis, menguraikan kerangka konseptual dan proses penurunan hipotesis penelitian. Bab ini menjelaskan mekanisme pembentukan hipotesis berdasarkan konsep penurunan logis.

Bab IV metode Penelitian, menguraikan rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional serta teknik analisis data. Bab ini menjelaskan teknik pengolahan data sampai pada penggunaan alat analisis yang digunakan peneliti.

Bab V hasil penelitian, menguraikan deskripsi data dan deskripsi hasil Penelitian yang diperoleh berdasarkan metode dan prosedur yang diuraikan dalam metodologi penelitian yang terdiri atas paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data.

Bab VI pembahasan, menguraikan dan membahas hasil analisis data penelitian sebagai dasar dalam menarik kesimpulan.

Bab VII penutup, menguraikan mengenai kesimpulan, implikasi dan keterbatasan penelitian serta saran dari pembahasan yang dilakukan terhadap hasil yang diperoleh dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Menurut (Widiyanto, 2008) dalam (Seftianova, 2013) Perencanaan kas merupakan suatu bagian penting dalam upaya percepatan penyerapan anggaran karena dengan adanya perencanaan kas yang baik akan memastikan tersedianya dana untuk membiayai kegiatan pemerintah. Hal ini tentunya dapat mencegah kemungkinan terhambatnya suatu kegiatan akibat dari tidak tersedianya dana.

Menurut (Seftianova, 2013) DIPA atau DPAMerupakan hasil transformasi dari dokumen perencanaan anggaran atau RKA-KL yang dibuat oleh Kementerian Negara/Lembaga. Oleh karena itu, kualitas DIPA berkaitan erat dengan perencanaan anggaran. Semakin baik perencanaan anggaran yang dibuat oleh satker Kementerian Negara/Lembaga maka semakin baik pula kualitas DIPA tersebut.

2.2. Penyerapan Anggaran

Menurut (Halim, 2014), bahwa penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Secara lebih mudah, masyarakat umum menyebutnya pencairan anggaran. Oleh karena yang diamati adalah entitas pemerintahan atau organisasi sektor publik, maka penyerapan anggaran dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran

sesuai yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu.

Senada dengan pendapat Halim, menurut (Kuncoro, 2013) dalam (Sanjaya, 2018) bahwa penyerapan anggaran adalah salah satu dari beberapa tahapan dalam siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPRD), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.

Kemampuan penyerapan anggaran dianggap baik dan berhasil apabila prestasi penyerapan anggaran sesuai dengan prestasi aktual fisik pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan anggapan bahwa prestasi fisik aktual pekerjaan tersebut adalah relatif sama dengan target prestasi penyelesaian pekerjaan yang telah direncanakan. Sederhananya, dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa suatu penyerapan anggaran dikategorikan baik apabila telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Terdapat dua sudut pandang mengenai rendahnya penyerapan anggaran (Halim, 2014) dalam (Sanjaya, 2018). Ada pun pendapat tersebut sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran yang dimaksud adalah realisasi anggaran pada akhir tahun dibandingkan dengan anggarannya.
2. Dari segi ketidakproporsionalitasnya penyerapan anggaran.

Selanjutnya menurut (Rambe, 2018), mengatakan bahwa efektivitas penyerapan anggaran lebih menekankan pada pencapaian segala sesuatu yang dilaksanakan berdaya guna yang berarti tepat, cepat, hemat, dan selamat. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Tepat, diartikan bahwa apa yang dikehendaki tercapai memenuhi target dan apa yang diinginkan menjadi realitas.
2. Cepat, diartikan bahwa pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sesuai atau sebelum waktu yang ditetapkan.
3. Hemat, diartikan bahwa tidak terjadi pemborosan dalam bidang apapun dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Selamat, diartikan bahwa tidak mengalami hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan kegagalan sebagian atau seluruh usaha pencapaian tujuan.

2.3. Perencanaan Anggaran

Secara umum perencanaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan telah lalu. Perencanaan (*planning*) merupakan proses yang diawali dengan penetapan tujuan organisasi berupa penentuan strategi untuk pencapaian tujuan secara menyeluruh serta perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan tersebut (Iqbal, 2018) Perencanaan dapat dilihat dalam tiga kategori, yaitu:

1. Kategori Proses

Perencanaan merupakan suatu proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cara atau strategi dalam pencapaian tujuan tersebut.

2. Kategori Fungsi Manajemen

Perencanaan berfungsi pada kondisi dimana pimpinan menggunakan pengaruh atau wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan serta kegiatan organisasi.

3. Kategori Pengambilan Keputusan

Perencanaan adalah pengambilan keputusan jangka panjang atau yang akan datang mengenai hal yang akan dilakukan, cara pelaksanaan, dan waktu serta pelaku hal tersebut. Dalam perencanaan, keputusan yang diambil belum tentu sesuai dengan tujuan sebelumnya sehingga implementasi perencanaan tersebut akan dibuktikan pada masa yang akan datang.

Menurut (Kuncoro, 2013) perencanaan diartikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Merujuk pada definisi tersebut, terdapat empat elemen dasar perencanaan, yaitu:

1. Merencanakan berarti menentukan pilihan

Hal tersebut dapat diartikan bahwa tahap perencanaan adalah proses pemilihan berbagai sumber daya yang akan digunakan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan.

2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya

Pada tahap perencanaan dilaksanakan suatu proses alokasi besarnya sumber daya-sumber daya yang digunakan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu pilihan berarti menentukan prioritas pembangunan daerah, baik fokus (sektoral) maupun Fokusnya

(wilayah). Fokus memperlihatkan wilayah kabupaten/kota/kecamatan/kawasan) yang ingin dikerjakan, sedangkan fokus memperhatikan sektor yang menjadi prioritas.

3. Perencanaan adalah alat untuk mencapai tujuan

Tujuan ini tercermin dari target atau ukuran kinerja yang ingin dicapai.

4. Perencanaan untuk masa depan

Diartikan bahwa perencanaan merupakan tahap yang diperlukan dalam menentukan masa depan.

Berbicara tentang perencanaan dan penganggaran anggaran pemerintah, sejak tahun 1990 proses tersebut sudah berubah secara substansial, aspek perubahan dan tuntutan yang mendasar terletak pada pertanggungjawaban dari kinerja pemerintah dan ketersediaan dari teknologi informasi (Iqbal, 2018). Di Indonesia, tuntutan perubahan tersebut mulai terasa sejak tahun 1998, dikarenakan adanya tuntutan reformasi yang menuntut untuk diwujudkan sistem tata kelola pemerintah yang baik. Sehingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menekankan pengintegrasian sistem pertanggungjawaban kinerja ke dalam sistem penganggaran. Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut memaparkan bahwa rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja (kinerja) yang akan dicapai.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBD/APBN dalam undang-undang tersebut meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem

penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran dan penggunaan kerangka pengeluaran jangkamenengah dalam penyusunan anggaran.

2.4. Kualitas DIPA

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban Anggaran serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah (Seftianova, 2013). Pengelolaan keuangan daerah harus menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai fungsi program kegiatan dalam mencapai sasaran dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 171/PMK.02/2013 (Halim, 2014).

Menurut (Seftianova, 2013) DIPA atau DPA merupakan hasil transformasi dari dokumen perencanaan anggaran atau RKA-KL yang dibuat oleh Kementerian Negara/Lembaga. Oleh karena itu, kualitas DIPA berkaitan erat dengan perencanaan anggaran. Semakin baik perencanaan anggaran yang

dibuat oleh satkerKementerian Negara/Lembaga maka semakinbaik pula kualitas DIPA tersebut.

DPA atau DIPA adalah dokumenpelaksanaan anggaran yang disusun olehPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur JenderalPerbendaharaan atau Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Perbendaharaan atas namaMenteri Keuangan selaku Bendahara UmumNegara (Pasal 1 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan Nomor 164/PMK.05/2011) yangberisi data dan uraian seluruh kegiatan yangakan dilakukan beserta alokasi anggarannya, danmerupakan dasar bagi PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untukmelakukan tindakan yang mengakibatkanpengeluaran negara. Apabila dalampelaksanaannya terdapat pertimbanganpertimbangan lanjutan terhadap DIPA (misalnyaperubahan program, perubahan jenis belanja, danlain-lain), maka DIPA tersebut bisa direvisi.Dasar hukum revisi DIPA adalah PeraturanMenteri Keuangan, dan petunjuk teknis atasrevisi DIPA dalah Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan, yang berbeda-beda untuk tiap-tiap tahun anggaran.

DIPA atau DPA berlaku untuk satu TahunAnggaran dan informasi satuan-satuan terukuryang berfungsi sebagai dasar pelaksanaankegiatan dan penggunaan anggaran. Disampingitu DIPA atau DPA dapat dimanfaatkan sebagaialat pengendali, pelaksanaan, pelaporan,pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkatakuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPAmerupakan batas pengeluaran tertinggi yangtidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harusdapat dipertanggung- jawabkan sesuai denganperaturan pemerintah.

Menurut (Seftianova, 2013) menyatakan kualitas DIPA atau DPA berkaitan erat dengan perencanaan anggaran. Semakin baik perencanaan anggaran yang dibuat oleh satker Kementerian Negara/Lembaga maka semakin baik pula kualitas DIPA tersebut dengan memenuhi kriteria dibawah ini:

1. Ketepatan waktu dalam menerima DIPA.

Dengan langkah-langkah ketepatan waktu dalam menerima daftar isian pelaksanaan anggaran sebagai berikut:

- a. Menteri Keuangan memberitahukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyampaikan DIPA kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan setelah diterimanya SP RKAKL.
- b. Berdasarkan pemberitahuan dari Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyusun jadwal validasi DIPA Kementerian Negara/Lembaga dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal / Sekretaris Utama Kementerian Negara / Lembaga.
- c. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama memerintahkan para KPA satker agar menyampaikan DIPA atau DPA dan ADK kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan jadwal validasi yang telah ditetapkan.
- d. Direktur Jenderal Perbendaharaan memerintahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menyusun jadwal validasi DIPA dan disampaikan kepada KPA satker di wilayah kerjanya.

e. Petugas Direktorat Pelaksanaan Anggaran menerima DIPA, selanjutnya melakukan validasi dengan mencocokkan DIPA dengan rincian APBN yang terdapat dalam database RKAKL-DIPA.

2. Tidak adanya kesalahan dalam DIPA.

Setelah DIPA disahkan dan diterima oleh KPA, KPA berkewajiban melakukan pemeriksaan kembali terhadap DIPA untuk memastikan bahwa DIPA yang diterima telah sesuai dengan RKAK/L dan tidak terdapat kesalahan-kesalahan, baik yang bersifat administratif maupun substantif. Penelitian dimaksud meliputi antara lain kode dan nomenklatur satker, pejabat perbendaharaan, kode kantor bayar, kode kewenangan, kode lokasi, sumber dana, jenis belanja, cara penarikan, jumlah pagu anggaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan jumlah anggaran yang diblokir. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan kesalahan, maka segera disampaikan kepada Kantor Pusat/Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk dilakukan revisi/penyesuaian seperlunya sesuai kewenangan. Hal tersebut perlu dilakukan agar dalam pelaksanaan kegiatannya, satker tidak mengalami hambatan sehingga penyerapan anggaran dapat dimulai secepatnya sejak awal tahun anggaran.

3. Tidak diperlukannya revisi DIPA

Revisi DIPA yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan dan pergeseran rincian anggaran pada DIPA tahun berjalan. Perubahan-perubahan tersebut dapat berupa perubahan pagu, perubahan

kegiatan, output, sub output, komponen, sub komponen, akun dan informasi lain.

4. Tidak adanya tanda bintang

Apabila DIPA perlu revisi karena tidak sesuai dengan kebutuhan maka anggaran kegiatan diblokir/ tanda bintang karena belum ada data pendukung atau harus ada persetujuan terlebih dahulu dari DPRD hal akan membuat dana anggaran tidak dapat di cairkan maka lebih baik tidak ada tanda bintang dalam DIPA maka sangat perlu untuk tidak ada tanda bintang di dokumen perencanaan atau DIPA pada satker.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam penyerapan anggaran Pemerintah baik Pemerintah Daerah, Kementrian/Lembaga dan SKPD telah banyak dilakukan sebelumnya.

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ratih Seftianova (2013)	Pengaruh kualitas dipa dan akurasi perencanaan kas terhadap kualitas penyerapan anggaran pada satker wilayah kppn malang	Kualitas dipa dan akurasi perencanaan kas berpengaruh positif terhadap kualitas penyerapan anggaran
2	Irma Aldina (2013)	Pengaruh kualitas dipa, sistem pengendalian internal pemerintah dan sistem anggaran berbasis kinerja terhadap tingkat penyerapan anggaran (Studi empiris pada SKPD di Kota Padang)	(1) Kualitas DIPA pengaruh signifikan positif terhadap tingkat penyerapan anggaran. (2) Sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai pengaruh signifikanPositifterhadap tingkat penyerapan anggaran.

			(3) Sistem anggaran berbasis kinerja tidak pengaruh signifikan tetapi berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan anggaran.
3	Cut Malahayati .dkk (2015)	Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap serapan anggaran satuan kerja perangkat daerah (skpd) pada pemerintah kota banda aceh	kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran berpengaruh secara simultan ataupun parsial terhadap serapan anggaran
4	Monik Zarinah .Dkk (2016)	Pengaruh perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia terhadap tingkat penyerapan anggaran satuan kerja perangkat daerah di kabupaten aceh utara	perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara simultan ataupun parsial terhadap tingkat penyerapan anggaran
5	Tessa Sanjaya (2018)	Pengaruh regulasi keuangan daerah, politik anggaran dan	(1) Regulasi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan

		<p>pelaksanaan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran pada pd provinsi sumatera barat</p>	<p>positif terhadap penyerapan anggaran dengan koefisien β sebesar -0,014 dan nilai signifikansi 0,903 > 0,05, (2) Politik anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran dengan koefisien β sebesar 8,952 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran dengan koefisien β sebesar -0,032 dan nilai signifikansi 0,664 > 0,05.</p>
--	--	---	--

Pada tahun 2013 Ratih Seftianova meneliti Pengaruh kualitas dipa dan akurasi perencanaan kas terhadap kualitas penyerapan anggaran pada satker wilayah kppn malang dimana hasil penelitiannya yaitu Kualitas dipa dan akurasi perencanaan kas berpengaruh positif terhadap kualitas penyerapan anggaran, sementara itu Irma Aldina pada tahun yang sama meneliti Pengaruh kualitas

dipa, sistem pengendalian internal pemerintah dan sistem anggaran berbasis kinerja terhadap tingkat penyerapan anggaran (Studi empiris pada SKPD di Kota Padang) dengan hasil penelitiannya (1) Kualitas DIPA pengaruh signifikan positif terhadap tingkat penyerapan anggaran. (2) Sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat penyerapan anggaran. (3) Sistem anggaran berbasis kinerja tidak pengaruh signifikan tetapi berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan anggaran. Dilanjutkan pada tahun 2015 Cut Malahayati .dkk juga melakukan penelitian tentang Pengaruh perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia terhadap tingkat penyerapan anggaran satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Aceh Atara dengan kesimpulan perencanaan Anggaran dan kualitas Sumber daya Manusia berpengaruh secara simultan ataupun parsial terhadap tingkat penyerapan anggaran, senada dengan ke empat peneliti yang sudah melakukan penelitian tentang penyerapan anggaran pada tahun 2018 Tessa Sanjaya meneliti Pengaruh regulasi keuangan daerah, Politik Anggaran dan Pelaksanaan pengadaan barang/jasa terhadap Penyerapan Anggaran di Provinsi Sumatera Barat yang menghasilkan tiga kesimpulan, yaitu : (1) Regulasi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran dengan koefisien β sebesar -0,014 dan nilai signifikansi $0,903 > 0,05$, (2) Politik anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran dengan koefisien β sebesar 8,952 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran dengan koefisien β sebesar -0,032 dan nilai signifikansi $0,664 > 0,05$.

2.6. Kerangka Pemikiran

Public Finance Theory (keuangan publik) bertujuan untuk mengatur sektor-sektor penting negara/daerah seperti industri, pertanian, perdagangan dan transportasi serta untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi pemerintah dan sektor swasta. Menyediakan layanan dasar kepada masyarakat seperti pembelaan, pemeliharaan hukum dan ketertiban, perlindungan kehidupan dan harta benda. Menyediakan layanan sosial bagi masyarakat, pendidikan, perawatan kesehatan dan jaminan sosial. Memastikan stabilitas ekonomi dan mencapai tingkat pembangunan yang wajar. Keseluruhan tujuan ditentukan oleh jenis dan bentuk strategi kebijakan pemerintah dan ditentukan oleh besarnya anggaran yang ditetapkan pada tahapan perencanaan, dan sejauh mana konsistensi dalam merealisasikan perencanaan sebagaimana tercantum pada dokumen pelaksanaan anggaran pada masing-masing instansi yang disebut DIPA (Seftianova, 2013).

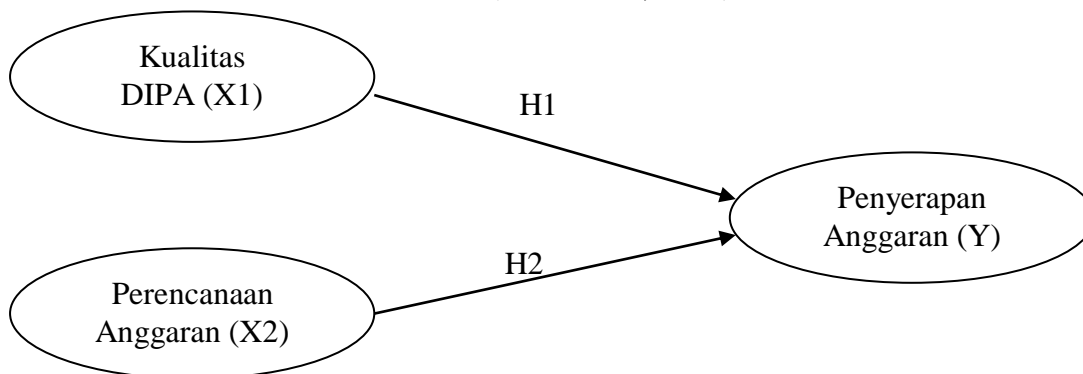
Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan akan berimplikasi pada penyerapan anggaran, namun pada sisi yang lain, aparatur pemerintah sebagai sumber daya manusia yang diberikan wewenang untuk terlibat langsung dalam perencanaan anggaran sekaligus sebagai pelaksana anggaran juga dituntut agar memiliki kapasitas atau kemampuan yang memadai (Iqbal, 2018).

Menurut (Seftianova, 2013) Perencanaan yang terintegrasi dan Kualitas DIPA yang baik diyakini menjadi unsur tercapainya target penyerapan anggaran. Namun sejauh mana kedua unsur tersebut mampu memengaruhi penyerapan anggaran. Penelitian ini akan meneliti apakah perencanaan

anggaran, dan Kualitas DIPA memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran dan sehingga secara skematis kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber : (Seftianova, 2013)



2.7. Hipotesis

Public Finance Theory (keuangan publik) bertujuan untuk mengatur sektor-sektor penting negara/daerah seperti industri, pertanian, perdagangan dan transportasi serta untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi pemerintah dan sektor swasta. Menyediakan layanan dasar kepada masyarakat seperti pembelaan, pemeliharaan hukum dan ketertiban, perlindungan kehidupan dan harta benda. Menyediakan layanan sosial bagi masyarakat, pendidikan, perawatan kesehatan dan jaminan sosial. Memastikan stabilitas ekonomi dan mencapai tingkat pembangunan yang wajar. Keseluruhan tujuan ditentukan oleh jenis dan bentuk strategi kebijakan pemerintah dan ditentukan oleh besarnya anggaran yang ditetapkan pada tahapan perencanaan, dan sejauh mana konsistensi dalam merealisasikan perencanaan sebagaimana tercantum pada dokumen pelaksanaan anggaran pada masing-masing instansi yang disebut DIPA (Seftianova, 2013).

Pengaruh Kualitas DIPA terhadap penyerapan Anggaran

DIPA atau DPAMerupakan hasil transformasi dari dokumen perencanaan anggaran atau RKA-KL yang dibuat oleh Kementerian Negara/Lembaga. Olehkarena itu, kualitas DIPA berkaitan erat dengan perencanaan anggaran. Semakin baik perencanaan anggaran yang dibuat oleh satkerKementerian Negara/Lembaga maka semakin baik pula kualitas DIPA tersebut.

Berdasarkan hasil *survey* penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Direktorat JenderalPerbendaharaan menunjukkan bahwa aspek dokumen pelaksanaan anggaran merupakan salah satufaktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran.Hal ini juga didukung oleh pendapat dari DirekturPelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menyatakan bahwa salah satufaktor yang mempengaruhi laju penyerapan anggaran adalah dokumen DIPA yang masih memerlukanrevisi (Redaksi Media Keuangan, 2011). Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini adalah :

H_i : Kualitas DIPA berpengaruh terhadap penyerapan Anggaran.

Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Perencanaan (*planning*) merupakan proses yang diawali dengan penetapan tujuan organisasi berupa penentuan strategi untuk pencapaian tujuan secaramenyeluruh serta perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan tersebut (Iqbal, 2018).

Kemampuan penyerapan anggaran dianggap baik dan berhasil apabila prestasi penyerapan anggaran sesuai dengan prestasi aktual fisik pekerjaan yang

dapat diselesaikan dengan anggapan bahwa prestasi fisik aktual pekerjaan tersebut adalah relatif sama dengan target prestasi penyelesaian pekerjaan yang telah direncanakan. Sederhananya, dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa suatu penyerapan anggaran dikategorikan baik apabila telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan (Halim, 2014)dalam(Sanjaya, 2018). Atas dasar itu penelitian ini kembali dilakukan dengan tujuan untuk menguji interaksi kualitas DIPAdan perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran.



HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA

BAB III DAN BAB IV

DAPAT DIAKSES MELALUI

UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif signifikan faktor Kualitas DIPA terhadap, terhadap Peyerapan Anggaran, dapat dilihat pada hasil uji *t-test* memiliki nilai *Positive* yaitu sebesar 2,049 terhadap Peyerapan Anggaran yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima dan signifikan sebesar 0,050. Hal ini bermakna semakin baik Kualitas DIPA maka akan semakin baik tingkat penyerapan anggaran. Ini berarti bahwa semakin matang kualitas DIPA dapat menjadi pedoman, maka setiap program kerja/kegiatan tersebut dalam satu tahun anggaran akan berjalan dengan baik pula, sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai. pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Resor Kendal, Sektor Plantungan.
2. Terdapat pengaruh positif signifikan faktor perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran, dapat dilihat hasil uji *t-test* memiliki nilai *Positive* yaitu sebesar 2,810 terhadap Peyerapan Anggaran yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima dengan nilai signifikan sebesar 0,009. Hal ini bermakna semakin baik perencanaan anggaran maka akan semakin baik tingkat penyerapan anggaran. Ini berarti bahwa semakin matang aparatur pemerintah sebagai pengelola anggaran dalam merencanakan, maka setiap

program kerja/kegiatan tersebut dalam satu tahun anggaran akan berjalan dengan baik pula, sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai. pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Resor Kendal, Sektor Plantungan.

5.2. Keterbatasan

Adapun keterbatasan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ketidakmampuan peneliti untuk menjamin atau mengendalikan sepenuhnya kesungguhan, keterbukaan, serta kejujuran responden dalam memilih opsi jawaban sesuai dengan keadaan dan kenyataan, baik karena ketidakmampuan atau pemahaman yang kurang serta adanya unsur tekanan dari pihak tertentu.
2. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada faktor kualitas DIPA dan perencanaan anggaran dalam meningkatkan penyerapan anggaran yang tinggi. Tidak menutup kemungkinan masih ada fakto-faktor lainnya yang mampu memengaruhi penyerapan anggaran namun belum diuji dalam penelitian ini.
3. Penelitian hanya mengambil lokasi pada Satuan Kerja Kepolisian daerah Jawa Tengah, Resor Kendal, Sektor Plantungan, sehingga untuk satuan lain yang berbeda, dimungkinkan terjadinya perbedaan kesimpulan.

5.3. Saran

Adapun saran–saran yang dapat diajukan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Disarankan kepada pihak Resor Kendal, khususnya Kepolisian Sektor Plantungan untuk senantiasa memaksimalkan perencanaan anggaran yang dilakukan serta berupaya meningkatkan kompetensi para pengelola

anggaran dengan mengacu kepada prinsip-prinsip anggaran sektor publik, sehingga penyerapan anggaran terus mengalami peningkatan.

- b. Selanjutnya, disarankan kepada pengampu Anggaran khususnya Kepolisian Sektor Plantunganagar mematuhi dan disiplindan terhadap tujuan-tujuan organisasi pemerintah sesuai dengan karakteristik anggaran sektor publik yang menuntut adanya komitmen dalam mengelola keuangan publik.
- c. Penelitian ini hanya menguji dua variabel bebas yaitu kualitas DIPA dan perencanaan anggaran, maka disarankan untuk peneliti selanjutnya agar menguji variabel-variabel yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldina, I. (2016). "Pengaruh kualitas dipa, sistem pengendalian internal pemerintah dan sistem anggaran berbasis kinerja terhadap tingkat penyerapan anggaran (Studi empiris pada SKPD di Kota Padang)". *Jurnal Ilmiah* .
- Culter, R. D. (2002). "Management". New Jersey: Prentic Hell.
- Ghozali. (2005). "Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS". Semarang: Undip.
- Ghozali, I. (2013). "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS". Semarang: Undip.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iqbal, M. (2018). "Pengaruh perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi". Makasar: universitas hasanudin.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2019). "Rincian Kertas Kerja Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Polres Kendal Tahun Anggaran 2019". Kendal: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kepolisian Republik Indonesia. (2018). KEP/844/VI/2018 Tentang "Norma Indeks di lingkungan Polri Tahun Anggaran". 2019. Jakarta: POLRI.
- Kuncoro. (2013). "Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi Sipp Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Dinas Pu Prov. Kaltim. Kalimantan Timur": Universitas Mulawarman.

- Lubis. (2002). "Metode Penelitian Akuntansi dan Format Penelitian". Medan: Usu Press.
- Malahayati, C. (2015). "Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap serapan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada pemerintah kota Banda Aceh" . Jurnal Ilmiah , 11-19.
- Mardiasmo. (2009). "Akuntansi Sektor Publik". Yogyakarta: Andi.
- Nundarto. (2019). "Capaian Anggaran. Kepala Kepolisian Sektor Plantungan" (p. 1). Kendal: Kasium.
- Rambe, F. A. (2018). "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi sumatera utara". Jurnal Ilmiah .
- Sanjaya, T. (2018). "Pengaruh regulasi keuangan daerah, politik anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran pada opd provinsi sumatera barat". Jurnal Ilmiah , 1-13.
- Seftianova, R. (2013). "Pengaruh kualitas DIPA dan Akurasi perencanaan Kas terhadap Kualitas penyerapan anggaran Pada Satker KPPN Malang". Jurnal Ilmiah , 75-85.
- Suwarni, D. E. (2016). "Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di kota surabaya". Jurnal Ilmiah .
- Widiyanto, S. &. (2008). "Modul Perencanaan Kas". Jakarta: Direktorat Jendral Perbendaharaan.

Yudiyanto, H. S. (2011). "Akuratnya Perencanaan Kas, Berkualitasnya Penyerapan Anggaran". Retrieved September 11, 2011, from www.perbendaharaan.go.id

Zarinah, M. (2016). "Pengaruh perencanaan anggaran dan kualitas Sumber daya manusia terhadap tingkat Penyerapan anggaran satuan kerja perangkat Daerah di kabupaten aceh utara" . Jurnal Ilmiah , 90-97.